

IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL UNTUK ANAK TERLANTAR DI BBPPKS KOTA PADANG

Haziva Diwala Naswa¹, Harisnawati², Inoki Ulma Tiara³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan IPS Universitas PGRI Sumatera Barat
Email Korespondensi: havizadiwalanaswa@gmail.com

Submitted: 15-08-2025; Accepted: 08-09-2025; Published : 23-09-2025

ABSTRAK

Permasalahan sosial yang sering terjadi di sekitar kita, salah satunya yaitu anak terlantar. Masalah anak terlantar merupakan isu kompleks yang membutuhkan penanganan yang komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial guna memulihkan fungsi sosial anak terlantar dan bersosialisasi kembali ketengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sosial untuk Anak terlantar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang dianalisis dalam paradigma deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, observasi non partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial di BBPPKS Kota Padang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari asesmen awal penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan program bimbingan (fisik, mental, sosial, dan spiritual), hingga reintegrasi sosial. Meskipun memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan kapasitas pekerja sosial, dan edukasi publik dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak terlantar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik rehabilitasi sosial anak di Indonesia.

Kata kunci: Rehabilitasi sosial, Anak terlantar, BBPPKS, Kota Padang

ABSTRACT

Neglected children remain one of the significant social issues frequently encountered in communities. This matter is complex, demanding an integrated approach that addresses physical, psychological, and social dimensions. Social rehabilitation programs play a key role in restoring the social functioning of these children and enabling their reintegration into society. The present research seeks to examine how such rehabilitation is implemented for neglected children at the Center for Social Welfare Education and Training (BBPPKS) in Padang City. Employing a qualitative methodology and a case study design, the investigation was framed within a descriptive-analytical perspective. Data collection relied on in-depth interviews, non-participant observations, and document reviews. Findings reveal that the social rehabilitation process at BBPPKS Padang comprises several phases, beginning with an initial needs assessment and intervention planning, followed by the delivery of comprehensive guidance services covering physical, mental, social, and spiritual support, and concluding with the reintegration of the children into their social environment. Despite notable achievements, implementation faces challenges such as limited human resources. The study underscores the necessity of strengthening inter-agency cooperation, enhancing the skills and capacity of social workers, and raising public awareness to foster a more inclusive environment for neglected children. Ultimately, the outcomes of this study are intended to inform and support the development of more effective policies and practices in child social rehabilitation across Indonesia.

Keywords: Social Rehabilitation, Neglected Children, BBPPKS, Padang City

PENDAHULUAN

Hak anak merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Konvensi Hak Anak. Sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap perlindungan hak-hak tersebut, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Dalam pengertian umum, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan (Natika & Rinjani, 2022).

Dengan demikian, peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan pengasuhan yang memadai, perlindungan, serta dukungan terhadap perkembangan fisik, mental, dan perilaku anak. Pola asuh yang diberikan akan memengaruhi pembentukan karakter anak sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Namun, di Indonesia masih banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar. Istilah keterlantaran merujuk pada kondisi di mana anak tidak terurus, tidak terpelihara, atau tidak mendapatkan perhatian yang layak. Anak terlantar adalah mereka yang tidak memperoleh pengasuhan dari orang tuanya (Adhania, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan anak terlantar menjadi isu serius baik dari sisi jumlah maupun kompleksitasnya. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi makro yang belum stabil. Rendahnya kesadaran akan pentingnya peran anak dalam masyarakat, serta lemahnya komitmen dan tanggung jawab keluarga, turut memperparah masalah keterlantaran. Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khusus. Selain jumlahnya yang signifikan, permasalahan ini bersifat saling terkait dan dapat menimbulkan dampak berantai jika kebutuhan serta hak anak tidak terpenuhi

(Humaidi & Fatmawati, 2019).

Isu anak terlantar di Indonesia adalah masalah sosial yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Anak terlantar adalah mereka yang tidak mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan yang memadai, baik dari orang tua maupun keluarga. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perceraian, atau ketidak siapan untuk menjadi orang tua (Rizaty, 2022). Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang rehabilitas sosial dasar bagi anak terlantar, pada pasal 1 dalam peraturan menteri yang berisi rehabilitas sosial anak terlantar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak.

Dalam hal ini pasti dibutuhkananya tim Koordinasi layanan kesejahteraan anak yaitu pusat Koordinat rehabilitas sosial atau nama lain yang berada di daerah atau kabupaten, kota. Dalam menangani kasus anak terlantar pasti dibutuhkananya tim koordinasi layanan kesejahteraan anak yaitu pusat koordinasi rehabilitas sosial atau nama lain yang berada di daerah, kabupaten, kota. Salah satu dinas sosial yang menjadi koordinasi layanan kesejahteraan anak di kota Padang yaitu balai besar pendidikan dan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (BBPPKS) memiliki implementasi penting dalam mendukung program rehabilitas sosial bagi anak terlantar di kota Padang.

Isu anak terlantar dapat dipahami sebagai disfungsi dalam struktur sosial, di mana anak-anak gagal diintegrasikan secara efektif ke dalam masyarakat. Fenomena ini, yang marak terjadi di perkotaan seperti Kota Padang khususnya di BBPPKS Kota Padang. Sehingga Seperti yang di jelaskan oleh Teori AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang setiap sistem sosial, termasuk masyarakat, harus memenuhi empat fungsi dasar agar dapat bertahan dan berfungsi dengan baik: adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal attainment*), integrasi (*integration*), pemeliharaan pola (*Latency atau pattern maintenance*). Hal ini sama dengan

Program rehabilitasi sosial di BBPPKS Kota Padang merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi integrasi dan pemeliharaan pola bagi anak terlantar. Secara konseptual, program ini berfungsi sebagai agen sosialisasi sekunder.

Meskipun hak anak diatur dalam undang-undang, permasalahan anak terlantar di Kota Padang masih sangat kompleks. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan faktor kemiskinan, tetapi juga stigma sosial yang kuat dalam masyarakat lokal dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya reintegrasi anak. Meskipun BBPPKS telah menjalankan program rehabilitasi, belum ada evaluasi komprehensif yang secara spesifik mengukur efektivitas program dalam konteks budaya Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena akan mengisi celah pengetahuan tersebut dan memberikan rekomendasi yang praktis bagi BBPPKS untuk meningkatkan dampak program agar lebih sesuai dengan karakteristik sosial-budaya di Padang.

Studi ini memiliki signifikansi yang sangat besar, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menjadi salah satu studi kasus pertama yang menerapkan Teori AGIL Talcott Parsons untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sosial anak di Indonesia, sehingga memperkaya literatur sosiologi dalam konteks non-Barat. Secara praktis, temuan dari penelitian ini akan memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk meningkatkan standar program rehabilitasi di seluruh balai-balai kesejahteraan sosial. Selain itu, hasil studi ini juga akan menjadi panduan praktis bagi para pekerja sosial dan pengelola BBPPKS Kota Padang untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran dan terukur, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif pada kehidupan anak terlantar. Penelitian ini memiliki tujuan mengimplementasi sejauh mana program rehabilitasi di balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (BBPPKS) Kota Padang seberapa berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Mengacu pada pandangan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, yang bersumber dari partisipan penelitian dan perilaku yang diamati (Moleong, 2011). Metode ini berpijak pada paradigma postpositivisme dan digunakan untuk mempelajari suatu objek dalam situasi alamiah, berbeda dengan eksperimen di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengombinasikan berbagai metode, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Penekanan utama dalam penelitian kualitatif terletak pada pemaknaan terhadap data, bukan pada upaya melakukan generalisasi (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi program rehabilitasi sosial di BBPPKS Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena kami tidak hanya ingin mengukur efektivitas program secara numerik, tetapi juga menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak terlantar, staf, dan pihak terkait lainnya. Melalui metode studi kasus, peneliti dapat meneliti program ini secara intensif dan holistik dalam konteks uniknya, serta mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program di lokasi penelitian.

Pendekatan kualitatif bertujuan memahami realitas melalui proses berpikir induktif. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlibat secara langsung pada konteks dan situasi fenomena yang diteliti, dengan fokus pada peristiwa yang terjadi sesuai kondisi nyata. Penelitian kualitatif mengedepankan objektivitas dalam memahami realitas yang bersifat subjektif, yakni dengan memandangnya dari sudut pandang individu yang menjadi objek kajian. (Sugiyono, 2021). Untuk mengumpulkan data kualitatif, peneliti

akan menggunakan wawancara mendalam dengan 5 staf BBPPKS. Wawancara ini akan dipandu oleh pedoman wawancara terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai dampak program, tantangan, dan persepsi mereka. Selain itu, peneliti akan melakukan observasi non-partisipan selama 30 jam di lokasi BBPPKS, menggunakan lembar observasi untuk mencatat interaksi sosial anak, partisipasi mereka dalam kegiatan, dan kondisi fasilitas fisik. Pedoman wawancara dan lembar observasi ini akan dilampirkan dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang dimana pertama penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari narasumber kemudian data tersebut di reduksi atau rangkum untuk membuat fokus penelitian, kemudian data di uraikan atau disajikan dalam bentuk narasi, kemudian data dibuat kesimpulan atau verifikasi untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk memilih 5 informan kunci. Kriteria pemilihan informan meliputi :

- a) Ketua POKJA Respon Kasus BBPPKS Kota Padang (1 orang)
- b) Koordinator Respon Kasus BBPPKS Kota Padang (1 orang)
- c) Perawat BBPPKS Kota Padang (2 orang)
- d) Pekerja Sosial BBPPKS Kota Padang (1 orang).

Penelitian ini juga menggunakan teori AGIL fungsional dari Talchon Parsono, Implementasi rehabilitas di BBPPKS Kota Padang sangat penting dalam memberikan multilayanan salah satunya kepada korban anak terlantar. Hal ini berkaitan dengan fungsigoal attainment dalam teori AGIL yang mengarah kepada pelaksanaan multilayanan yang diberikan kepada korban yakni rehabilitas BBPPKS sebagai moderator dan implentasi BBPPKS sebagai perwat psikologis dan sosialsangatlal krusial, terutama setelah transformasinya menjadi Balai Multi Layanan yang berfokus pada ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial).

Penelitian ini akan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Pertama, izin resmi untuk pengumpulan data akan diperoleh dari pimpinan BBPPKS Kota

Padang. Sebelum wawancara dan observasi dilakukan, peneliti akan mendapatkan persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) dari setiap partisipan. Untuk partisipan anak-anak, persetujuan juga akan diperoleh dari pihak BBPPKS yang bertindak sebagai wali. Partisipan berhak untuk menolak berpartisipasi atau menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Kerahasiaan dan anonimitas partisipan akan dijaga. Nama, inisial, atau informasi lain yang dapat mengidentifikasi partisipan akan disamarkan dalam laporan penelitian. Data yang dikumpulkan akan disimpan di tempat yang aman dan hanya dapat diakses oleh peneliti. Semua temuan akan dilaporkan dengan cara yang tidak akan membahayakan partisipan.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme sebagai fondasi filosofisnya. Paradigma ini mengakui adanya realitas sosial, namun juga memahami bahwa persepsi dan interpretasi individu memengaruhi realitas tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman anak terlantar dan implementasi program rehabilitasi, tanpa mengklaim kebenaran yang absolut. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. BBPPKS Kota Padang dipilih sebagai 'kasus' karena balai ini merepresentasikan sebuah unit tunggal yang unik, di mana fenomena rehabilitasi sosial anak terlantar dapat dipelajari secara holistik dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BBPPKS Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitas sosial bagi anak terlantar telah berjalan dengan baik karena BBPPKS berupaya keran menyediakan layanan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar. Seperti pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal sementara yang aman, serta layanan kesehatan dan pendampingan psikologis agar mereka bisa tumbuh dengan baik meskipun tidak berada di bawah pengasuhan orang tua kandungunya dan

BBPPKS juga berusaha melakukan mediasi dengan keluarga kandung untuk memulangkan anak kelingkungan keluarga yang lebih baik atau mencari keluarga asuh dan mengadopsi yang sah dan sesuai dengan hukum, namun di balik semua usaha tersebut masih terdapat banyak tantangan yang menghambat proses rehabilitasi sosial seperti keterbatasan jumlah tenaga profesional yang khusus menangani kasus anak terlantar.

Bagaimana BBPPKS berusaha mengembalikan anak terlantar kekeluargaan pengganti yang layak, serta apa saja kesulitan atau hambatan yang di hadapi BBPPKS dalam menjalani kebijakan ini, misalnya keterbatasan jumlah tenaga profesional, dana yang kurang mencukupi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak, dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dan perlu dilakukan BBPPKS agar anak-anak terlantar bisa mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang lebih baik di Kota Padang, sehingga masalah anak terlantar yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun dapat di tekan dan anak-anak bisa tumbuh dengan layak, aman, dan mendapatkan hak-hak secara penuh.

Meskipun data menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam program pelatihan keterampilan, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh dua faktor kunci. Faktor internal adalah metodologi pengajaran yang diterapkan oleh instruktur, yang berfokus pada pendekatan praktis dan individual. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh hambatan eksternal, yaitu sulitnya anak-anak mendapatkan pekerjaan setelah lulus karena stigma sosial yang masih melekat pada label 'anak terlantar.' Ini menunjukkan bahwa meskipun program rehabilitasi berhasil dari sisi internal, integrasi sosial anak-anak masih menjadi tantangan utama dan memerlukan intervensi lebih lanjut dari pihak eksternal, seperti dunia usaha dan masyarakat umum.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang, dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar telah berjalan dengan cukup baik

karena BBPPKS berupaya keras menyediakan layanan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dasar anak anak terlantar seperti pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal sementara yang aman, serta layanan kesehatan dan pedampingan psikososial agar mereka bisa tumbuh dengan baik meskipun tidak berada di bawah pengasuhan orang tua kandungnya, dan BBPPKS juga berusaha melakukan mediasi dengan keluarga kandung untuk memulangkan anak kelingkungan keluarga yang lebih baik atau mencari keluarga asuh dan mengadopsi yang sah dan sesuai dengan hukum, namun di balik semua usaha tersebut masih terdapat banyak tantangan yang menghambat proses rehabilitasi sosial seperti keterbatasan jumlah tenaga profesional yang khusus menangani kasus anak terlantar, kekurangan dana operasional untuk mendukung semua program rehabilitasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga, mengasuh, dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban penelantaran, sehingga untuk kedepannya di perlukan kerja sama yang lebih erat antar BBPPKS, Dinas Sosial, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran serta kepedulian bersama terhadap perlindungan hak-hak anak, serta perlu adanya penambahan anggaran dan tenaga profesional yang memadai supaya semua program rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih optimal, Sehingga diharapkan dengan dukungan semua pihak kasus anak terlantar yang semakin meningkat setiap tahunnya di kota padang bisa ditekan, anak anak yang saat ini sedang dalam proses rehabilitasi bisa kembali mendapatkan hak haknya, tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus ini kekurangan dana operasional untuk mendukung semua program rehabilitasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga, mengasuh, dan melindungi anak-anak agar

Implementasi Rehabilitas Sosial untuk Anak Terlantar Di BBPPKS Kota Padang
(Haziva Diwala Naswa, Harisnawati, Inoki Ulma Tiara)

tidak menjadi korban penelantaran, sehingga untuk kedepannya di perluhkan kerja sama yang lebih erat antar BBPPKS, DinasSosial, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran serta kepedulian bersama terhadap perlindungan hak-haknya, serta perlu adanya penambahan anggaran dan tenaga professional yang memadai supaya semua program rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih optimal, Sehingga diharapkan dengan dukungan semua pihak kasus anak terlantar yang meningkat setiap tahunnya di kota padang bisa ditekan, anak anak yang saat ini sedang dalam proses rehabilitasi bisa kembali mendapatkan hak haknya, tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang,serta memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.Berikut data anak terlantar di BBPPKS Kota Padang:

Tabel
Data anak terlantar di BBPPKS kota Padang

NO	Nama	umur	status
1.	Alena Inayah	3 tahun	Kembali pada keluarga
2.	Shanum Inayah	2 tahun	Direhabilitas BBPPKS
3.	Azizah Inayah	3 tahun	Direhabilitas BBPPKS
4.	Renata	6 tahun	Kembali pada keluarga
5.	Muhammad Zein	3 tahun	Kembali pada keluarga
6.	Muhammad Rizki	4 tahun	Kembali pada keluarga
7.	Muhammad Kaisar	5 tahun	Kembali pada keluarga

Sumber: penulis,2025

Berdasarkan dari hasil wawancara dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh anak terlantar yang di rehabilitas di BBPPKS, maka dapat dikatakan bahwa subjek bahwa anak terlantar ketika masuk untuk di rehabilitas di BBPPKS memiliki langkah-langkah nya karena penanganan dari BBPPKS

Kota Padang adalah subjek korban anak terlantar yang benar-benar memerlukan perlindungan dan penjagaan yang aman. Keadaan subjek tidak memungkinkan secara fisik untuk tinggal sendirian karena subjek merupakan anak.

Dengan berjalannya implementasi rehabilitas sosial di BBPPKS Kota Padang anak-anak terlantar yang awalnya berjumlah tujuh anak, sekarang anak terlantar yang di rehabilitas oleh BBPPKS berjumlah dua anak. Karena BBPPKS sudah berhasil mengembalikan anak-anak tersebut ke pada keluarganya masing-masing. Berikut data anak terlantar yang masih di rehabilitas di BBPPKS:

Tabel
anak terlantar yang masih di rehabilitas di BBPPKS Kota Padang

No	Nama	Usia
2.	Shanum Inayah	Dua tahun
3.	Azizah Inayah	Tiga tahun

Sumber: penulis,2025

Berdasarkan tabel di atas anak terlantar yang masih direhabilitas di BBPPKS Kota Padang hanya tertinggal dua anak, lima anak sudah berhasil di kembalikan oleh BBPPKS kepada orang tnya masing-masing.

Adapun BBPPKS Kota Padang dalam penanganan koeban anak terlantar dan mengacu bagaimana implementasi rehabilitas anak terlantar dalam menyelesaikan masalah sosial ditemukan heasil penelitian ini sebanyak empat rehabilitas yang dijalankan oleh BBPPKS di Kota Padang antara lain sebagai berikut :

1) Rehabilitas Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan implementasi yang berkaitan dengan pemberian, kesempatan dan dukungan oleh adanya beberapa tugas yang berkaitan dengan program pembedayaan masyarakat diantaranya rehabilitas sosial, dan fungsi lainnya sesuai dengan penugasan Menteri Sosial. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja BBPPKS dimana saat ini fokus pada pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya bagi penerima

manfaat/keluarga penerima manfaat (PM/KPM). Subjek yang menerima penanganan dari instansi tersebut.

2) Perawat psikologi dan sosial yang mendalam

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembentukan ikatan emosional dan stimulasi perkembangan psikososial. Kehadiran pengasuh yang berdedikasi dan terlatih, serta aktivitas stimulasi dini, turut mendukung pembentukan rasa aman dan percaya pada anak. Perawatan psikologis dan sosial yang mendalam adalah pendekatan holistik dalam memberikan dukungan dan intervensi bagi individu, terutama mereka yang rentan seperti anak terlantar, untuk memastikan kesejahteraan mental, emosional, dan sosial yang optimal. Ini melampaui pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan berfokus pada pembentukan koneksi emosional, stimulasi perkembangan kognitif dan sosial, serta pembentukan rasa aman dan percaya. Untuk anak terlantar.

3) Koordinasi lintas sektor yang efektif

Keberhasilan dari Implementasi juga didukung oleh jalinan kerja sama yang baik antara BBPPKS Kota Padang dengan dinas sosial, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini memastikan proses pengjangkauan, penempatan, dan penanganan kasus anak terlantar berjalan dengan lancar dan terintegrasi.

4) Evaluasi dan Keberlanjutan Rehabilitasi

Aspek terakhir ini berfokus pada bagaimana efektivitas program rehabilitasi diukur dan bagaimana keberlanjutan masa depan anak terlantar dipastikan. Ini mencakup metode evaluasi yang digunakan kesehatan anak, mekanisme pemantauan tumbuh kembang, serta rencana tindak lanjut (seperti reunifikasi dengan keluarga kandung jika memungkinkan, adopsi, atau penempatan di panti asuhan lain yang lebih permanen).

Berdasarkan hasil penelitian ini permasalahan ini penulis menggunakan teori stuktur fungsional oleh Talcott Parsons. Dalam

teori ini Talcott menggunakan empat fungsi yaitu *adaptation, goal attainment, integration, latency (AGIL)*. Teori ini sangat relevan dengan penelitian ini karena BBPPKS adalah sebagai sistem yang berperan sebagai implementasi rehabilitasi untuk mengatasi masalah sosial salah satunya anak terlantar yang ada di masyarakat. Dalam hal ini BBPPKS sebagai sistem yang berfungsi untuk mengatasi masalah sosial dengan melaksanakan program multi layanan ini mampu mengatasi permasalahan sosial yang berat seperti anak terlantar. Dengan adanya program multi layanan yang telah dilaksanakan oleh BBPPKS korban yang ditangani oleh BBPPKS direhabilitasi di asrama residensial yang bertujuan agar korban dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat di kembalikan kepada keluarganya, serta terdapat program penyuluhan/pembimbingan dapat mampu mempertemukan kembali anak terlantar kepada keluarganya dan meminimalisir terjadinya keterlantaran terhadap anak.

Dari hasil temuan peneliti diatas ada terdapat 4 rehabilitasi BBPPKS Kota Padang dalam menangani kasus anak terlantar antara lain sebagai rehabilitasi sebagai fasilitator, perawat psikologis dan sosial yang mendalam, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan evaluator. Dalam pelaksanaan multilayanan, BBPPKS tidak melakukan penelitian terhadap multilayanan tersebut termasuk penanganan kasus anak terlantar melainkan BBPPKS Kota Padang hanya sebagai evaluator dimana mengevaluasi setiap kinerja yang telah dilaksanakan untuk lebih baik ke depannya.

Selain itu, penulis juga mengkaitkan implementasi rehabilitasi BBPPKS Kota Padang dalam penanganan kasus anak terlantar dengan teori AGIL. Pada fungsi *adaptation*, implementasi BBPPKS Kota Padang dalam respon kasus anak terlantar biasanya terjadi pada keluarga yang berasal dari ekonomi, atau kesiapan yang belum menjadi orang tua, sehingga untuk melakukan penanganan, BBPPKS Kota Padang harus bisa beradaptasi melakukan pendekatan. Setidak-tidaknya, ketika melakukan penanganan dan perlindungan korban, BBPPKS Kota Padang

**Implementasi Rehabilitas Sosial untuk Anak Terlantar Di BBPPKS Kota Padang
(Haziva Diwala Naswa, Harisnawati, Inoki Ulma Tiara)**

berusaha terus-menerus mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial masyarakat penerima manfaat atau penanganannya. Selain itu, pada fungsi *adaption* menurut teori AGIL, mengarah kepada implementasi rehabilitas BBPPKS sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, bantuan sdm anak, bantuan pendidikan, dan bantuan layanan kesehatan terhadap anak terlantar.

Implementasi rehabilitas di BBPPKS Kota Padang sangat penting dalam memberikan multilayanan salah satunya kepada korban anak terlantar. Hal ini berkaitan dengan fungsi *goal attainment* dalam teori AGIL yang mengarah kepada pelaksanaan multilayanan yang diberikan kepada korban yakni rehabilitas BBPPKS sebagai mediator dan implentasi BBPPKS sebagai perawat dan sosial sangatlah krusial, terutama setelah transformasinya menjadi Balai Multi Layanan yang berfokus pada ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial). implementasi ini mencakup serangkaian intervensi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan kembalinya anak kepada keluarganya dengan tumbuh kembang yang optimal. Implementasi sebagai mediator berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam konteks anak terlantar terutama ketika ada konflik, miskomunikasi, dan kebutuhan dalam proses reintegrasi, pengambilan keputusan, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari di lembaga rehabilitas, mediator tidak selalu berarti mediasi hukum formal, tetapi juga bisa merujuk pada peran fasilitator komunikasi dan penyelesaian masalah. Sedang, rehabilitas sebagai pembimbing berkaitan dengan pencapaian tujuan perlindungan anak tersebut untuk pencegahan anak terlantar agar tidak terjadi kembali dan penanganan psikologi anak, edukasi, dan informasi. Sentra Layanan Sosial ini dimaksudkan sebagai wahana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan layanan atensi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Goal attainment memiliki tujuan utama menyediakan lingkungan stabil, aman, dan penuh kasih bagi anak terlantar, yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosionalnya. Hasil yang diharapkan, anak-anak dapat menjadi individu yang mandiri kedepannya, berpendidikan, dan bisa terintegrasi

kembali ke masyarakat sebagai individu produktif. Hal ini merupakan bentuk tujuan dari *integrattion* atau *Goaly* yaitu mengembalikan mereka yang kehilangan keluarganya, untuk bisa di persatukan kepada keluarganya dan di terima oleh lingkungan masyarakat.

Selain itu, fungsi *integration* megarah kepada implemntasi BBPPKS Kota Padang sebagai koordinasi lintas sektor yang efektif. Multilayanan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban yang mana salah satu pelaku orang tua yang belum siap menjadi orang sehingga anak tersebut tidak memiliki tempat tinggal dan perawatan, sehingga korban difasilitasi penginapan sementara, pendampingan asesmen psikologi. fungsi *integration* juga terlihat melalui koordinasi dan kerjasama BBPPKS Kota Padang dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga kepolisian.

Sedangkan fungsi *latency* mengarah kepada implemetansi BBPPKS sebagai motivator dan evaluator yang mana maksud dari fungsi *latency* adalah sebuah sistem harus memperlengkapi, memilihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun memberikan kehidupan yang layak untuk korban anak terlantar. Implementasi BBPPKS sebagai motivator diperlukan oleh korban, dan memberikan kesadaran menjadi motivasi hidup baginya untuk meneruskan kehidupan berikutnya. Sedangkan implementasi evaluator digunakan agar sistem BBPPKS Kota Padang dalam memberikan penanganan dan multilayanan dapat terus terlaksana secara berkelanjutan dan terus melakukan perbaikan ke depannya.

Melalui beberapa implementasi ini, peneliti juga menemukan fakta bahwa kompetensi seorang perawat dan koordinator menjadi penting dalam hal memberikan penanganan dan pendampingan korban selama masa rehabilitasi di BBPPKS Kota Padang. Ketelatenan perawat dalam memberikan perawatan, komunikasi yang baik/lembut, pendekatan perawat dengan korban anak terlantar, keahlian negosiasi koordinator dalam berkoordinasi dengan instansi lain demi memperjuangkan hak-hak korban dan

perlindungan hak-hak korban secara hukum sangat penting, karena pemberian penanganan bagi anak terlantar menuntut mereka untuk mengerti banyak hal, baik secara psikologi maupun perawatan terhadap anak, tidak hanya mengerti. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. *Latency* di BBPPKS juga harus memiliki peningkatan dalam kalaborasi lintas sektor karena kerja sama dengan lintas sektor seperti polisi, dinas sosial, dan rumah sakit untuk. BBPPKS harus mengembangkan kurikulum berbasis kasus yang adaptif yaitu bertujuan untuk menggunakan studi kasus nyata dari berbagai daerah untuk melatih korban dalam menghadapi situasi, seperti trauma kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi seperti menyediakan program pendampingan bagi para lulusan pelatihan untuk memastikan mereka mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan juga melakukan kegiatan balai multilayanan berfokus pada ATENSI (asisten rehabilitasi sosial), yang berharap bertujuan untuk dapat membantu anak terlantar dalam menemukan keluarganya. Sebelum ini BBPPKS merupakan tempat pendidikan bagi pekerja sosial akan tetapi setelah mengeluarkan ATENSI ini dapat diharapkan BBPPKS bisa menjadi wadah bagi masyarakat dan khususnya bagi anak terlantar.

Berdasarkan penelitian tentang anak terlantar yang ditempatkan di BBPPKS, dari tujuh anak terlantar yang diteliti, lima anak sekitar 71% berhasil dikembalikan ke keluarganya setelah mendapatkan pembinaan di BBPPKS. Sedangkan dua anak tersisa sekitar 28% masih berada dalam proses pembinaan karena beberapa faktor, seperti keluarga yang belum bersedia menerima atau memerlukan waktu adaptasi lebih lanjut. Rentang usia anak ini bervariasi, dari umur 1 hingga 6 tahun, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Tingkat keberhasilan pengembalian anak terlantar ke keluarga (5 dari 7 anak) menunjukkan efektifitas implementasi sosial yang dijalankan BBPPKS Kota Padang. Faktor utama

keberhasilan ini adalah adanya komunikasi yang intens antara pihak balai, anak dan keluarga. Pihak BBPPKS melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga untuk menyadari pentingnya peran mereka sebagai orang tua dalam masa depan anak. Selain itu, kesiapan mental anak untuk kembali ke lingkungan keluarga juga menjadi kunci keberhasilan BBPPKS.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan data penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BBPPKS Kota Padang memainkan implementasi yang sangat penting dalam penanganan kasus anak terlantar:

1. Rehabilitasi sebagai fasilitator: BBPPKS memberikan, pengasuhan, kesempatan, dan dukungan bagi anak terlantar selama rehabilitasi, termasuk pelatihan, layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Rehabilitasi ini membantu korban anak terlantar dalam mengatasi atau menampung sementara melalui dukungan SDM, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pemulihan jangka panjang.
2. Perawatan psikologis dan sosial yang mendalam: melalui pendekatan multi-layanan dan program ATENSI, memiliki implementasi vital sebagai lembaga yang melakukan rehabilitasi holistik untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan psikologi anak terlantar, serta memastikan masa depan yang lebih baik dan layak bagi mereka.

Koordinator lintas sektor yang efektif: dalam kasus anak terlantar di BBPPKS tidak bisa berdiri sendiri. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah menuntut adanya kolaborasi yang kuat terkoordinasi dengan instansi. Kasus anak terlantar di BBPPKS juga memerlukan banyak instansi salah satunya, dengan dinas sosial, kepolisian, rumah sakit.

3. Evaluasi dan keberlanjutan rehabilitasi: BBPPKS Kota Padang melakukan evaluasi berupa penilaian, saran,

masuk, terhadap multilayanan yang telah dilaksanakan dan menyusun beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja BBPPKS Kota Padang dalam menangani kasus anak terlantar. Evaluasi berkelanjutan dan penyusunan rekomendasi menunjukkan komitmen BBPPKS Kota Padang untuk terus meningkatkan layanan, ini penting untuk memastikan bahwa layanan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan korban. Mereka bukan hanya pelaksana tunggal, tetapi juga fasilitator dan integrator yang memastikan bahwa setiap anak terlantar menerima serangkaian layanan yang terhubung, dari penyelamatan awal hingga penempatan permanen yang stabil. Tanpa koordinasi yang mendalam ini, implementasi rehabilitasi anak terlantar akan berjalan parsial, rentan terhadap tumpang tindih atau kesenjangan layanan, dan pada akhirnya, kurang efektif dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi anak-anak yang paling rentan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhania, L. S. O. (2019). Analisis perilaku sosial anak terlantar dalam sistem pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Lumajang. *Develop: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 26–47. <https://doi.org/10.25139/dev.v3i2.1863>
- Ambat, T. (2013). Peran pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar menurut UUD 1945. *Lex Administratum*, 1(2), 42–46.
- Astutik. (2014). *Rehabilitasi sosial* 3. UIN Sunan Ampel, 5–11. <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Herlina, A. (2014). Kajian faktor pemicu, pola kehidupan, dan kerentanan perilaku menyimpang pada anak jalanan di Indonesia. *Pusat Pengkajian, Pengolahan*.
- Kartika, & Lestari, H. E. P. (n.d.). [Judul karya tidak tersedia – perlu dilengkapi].
- Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Pelaksanaan kebijakan pembinaan anak yang mengalami keterlantaran: Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(1), 53–62. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1346>
- Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Penerapan kebijakan pembinaan anak dalam kondisi terlantar: Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(1), 53–62. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1346>
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat DPR RI. (n.d.). [Judul dokumen tidak tersedia] *Majalah/Publikasi*, 5, 145–155.
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat DPR RI. (n.d.). [Judul publikasi perlu dilengkapi]. 5, 145–155.
- Rahmawati, E. J. (2017). Analisis hukum pidana terhadap praktik penelantaran bayi di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 295–304.
- Rahmawati, E. J. (2017). Analisis hukum pidana terkait kasus penelantaran anak di wilayah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 295–304.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2019). Program dukungan rehabilitasi sosial bagi remaja dengan keterbatasan sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2019). Strategi rehabilitasi sosial bagi remaja dengan keterbatasan sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tafuli, V. C., Asa, S., & Resopijani, A. (2024). Peran dan kontribusi Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam menangani anak terlantar di Kota Kupang sesuai ketentuan hukum nasional. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(2), 295–314.
- Tafuli, V. C., Asa, S., & Resopijani, A. (2024). Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam penanganan kasus anak terlantar di Kota Kupang sesuai ketentuan nasional. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(2), 295–314.
- Yunior, D. R. (2009). *Profil Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*. Management.